

## Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes "Kusuma Jaya" Desa Ngadikusuman Melalui Pelatihan Manajemen Keuangan yang Akuntabel

Romandhon<sup>1</sup>, Susanti<sup>2</sup>, Sri Hartiyah<sup>3</sup>, Nanang Agus Suyono<sup>4</sup>, Desy Wulandari<sup>5</sup>, Fella Yunita Fitriyani<sup>6</sup>, Rizki Maulidy<sup>7</sup>, Nur Baiti Jannati<sup>8</sup>, Agus Putranto<sup>9</sup>, Kurniawati Mutmainah<sup>10</sup>

<sup>12345678910</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Indonesia

Email: romandhon@unisq.ac.id

### Abstrak

BUMDes "Kusuma Jaya" Desa Ngadikusuman memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui berbagai unit usaha, namun masih menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel. Pencatatan transaksi yang masih sederhana serta belum tersusunnya laporan keuangan sesuai standar akuntansi (SAK ETAP) berpotensi menghambat transparansi dan pengambilan keputusan. Kondisi ini menjadi semakin penting mengingat adanya kebijakan alokasi minimal 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan yang menuntut pertanggungjawaban yang baik. Oleh karena itu, Program Studi Akuntansi FEB UNSIQ Wonosobo melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan fokus pada peningkatan kapasitas pengelola BUMDes di bidang manajemen keuangan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu sosialisasi dan pre-test, pelatihan inti (ceramah dan lokakarya), serta pendampingan dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, dengan lebih dari 85% mengalami kenaikan skor post-test. Selain itu, terbentuk sistem pencatatan yang lebih terstruktur, tersusunnya laporan keuangan dasar, serta meningkatnya kepercayaan diri pengelola dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola BUMDes guna mendukung keberlanjutan usaha dan pembangunan desa.

**Kata kunci:** BUMDES, Manajemen keuangan, Ketahanan pangan, Dana Desa, Akuntabilitas

### Abstract

*The "Kusuma Jaya" Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Ngadikusuman Village has significant potential to increase Village Original Income through various business units, but still faces challenges in professional and accountable financial management. Simplified transaction recording and the lack of financial reporting in accordance with accounting standards (SAK ETAP) have the potential to hinder transparency and decision-making. This situation is even more critical given the policy of allocating a minimum of 20% of Village Funds for food security programs, which requires strong accountability. Therefore, the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, UNSIQ Wonosobo, conducted a Community Service (PkM) activity focused on improving the capacity of BUMDes managers in financial management. The implementation method was carried out through three stages: socialization and pre-testing, core training (lectures and workshops), and mentoring and post-testing. The results of the activity showed an increase in participant understanding, with more than 85% experiencing an increase in post-test scores. In addition, a more structured recording system was established, basic financial reports were prepared, and managers' confidence in preparing accountability reports increased. This activity contributes to strengthening the accountability and governance of BUMDes to support business sustainability and village development.*

**Keywords:** BUMDES, Financial Management, Food Security, Village Funds, Accountability

## Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Kusuma Jaya" di Desa Ngadikusuman, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, dikenal sebagai salah satu BUMDes yang memiliki potensi dan menunjukkan perkembangan yang baik. Dengan unit-unit usaha yang beragam—seperti layanan air bersih (PAM desa), budidaya ikan dan bibit, serta peternakan ayam jawa super (Joper)—BUMDes ini menjadi pilar penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, seiring dengan pertumbuhan dan bertambahnya volume transaksi, pengelola BUMDes menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola keuangan secara profesional dan akuntabel. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi awal, ditemukan bahwa pencatatan transaksi masih dilakukan secara sederhana, dan penyusunan laporan keuangan baku (seperti Neraca, Laba Rugi, dan Arus Kas) belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang menjadi pedoman BUMDes. Kondisi ini berpotensi menghambat transparansi, evaluasi kinerja usaha, dan pengambilan keputusan strategis ke depan.

Konsep pemberdayaan desa melalui BUMDes juga menjadi salah satu ujung tombak untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang baik. Landasan hukum tentang tata laksana keuangan BUMDES muncul di Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Peraturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025 dipakai untuk dukungan program ketahanan pangan paling rendah sebesar 20 % dari total pagu Dana Desa di setiap desa. Ketentuan tersebut ada dalam pasal 7 ayat (4) Permendesa 2/2024 (peraturan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal republik indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025, 2025).

Ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus penopang stabilitas ekonomi nasional. Di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, kenaikan harga pangan, serta keterbatasan distribusi di wilayah terpencil, penguatan ketahanan pangan di tingkat desa menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, Dana Desa (DD) sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas desa untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDT) menetapkan kebijakan bahwa pada tahun anggaran 2025, minimal 20 persen Dana Desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan desa (Subandi, 2026).

Konteks di atas menekankan arti penting BUMDES guna ikut mensukseskan program ketahanan pangan nasional. Konteks tersebut juga menekankan bahwa keberadaan BUMDES dalam program ketahanan pangan juga harus dikelola dengan baik guna pertanggungjawaban atas 20 % dana yang diserap dari ADD. BUMDES sebagai lembaga ekonomi desa yang menerima penyertaan modal dari dana publik dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi sebagaimana diamanatkan dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, evaluasi kinerja usaha, serta menjamin efektivitas progra ketahanan pangan.

Pengelolaan keuangan BUMDES menjadi krusial guna menjamin akuntabilitas penggunaan dana desa, khususnya setelah adanya kebijakan alokasi minimal 20% untuk ketahanan pangan yang kemudian dialokasikan melalui BUMDES. Menurut (Mardiasmo, 2021) akuntabilitas merupakan kewajiban entitas publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada masyarakat. Akuntabilitas BUMDES merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola dalam mengelola sumber daya dan keuangan desa secara transparan, sesuai aturan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mencakup dua dimensi yaitu akuntabilitas vertikal kepada pihak yang lebih tinggi dan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat desa (Ardiyansyah & Pesudo, 2022). Akuntabilitas diwujudkan melalui proses pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) BUMDES yang baik dan tepat.

Manajemen keuangan BUMDES merupakan proses sistematis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang terintegrasi untuk mendukung keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat desa. Konteks tersebut tidak hanya administratif tetapi juga strategis berlandaskan prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Indikatornya tercermin dari ketersediaan laporan keuangan, kelengkapan bukti transaksi, adanya mekanisme audit dan otorisasi, partisipasi masyarakat, serta pencatatan dan pelaporan yang sistematis, sehingga keseluruhan proses mencerminkan sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan desa (Suryo Wibowo & Sulistya Hapsari, 2022).

Menanggapi tantangan tersebut dan berdasarkan pada kajian pustaka yang ada, Program Studi Akuntansi FEB UNSIQ Wonosobo melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan fokus pada peningkatan kapasitas pengelola BUMDes "Kusuma Jaya" Desa Ngadikusuman di bidang manajemen keuangan guna memperkuat akuntabilitas dan kualitas tata kelola. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengelola mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan, profesional, dan akuntabel, memberikan pelatihan praktis mulai dari pencatatan transaksi sederhana hingga penyusunan laporan keuangan sesuai kaidah akuntansi, serta mendampingi pengelola dalam menyusun laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja usaha.

## **Metode pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh Tim Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo di BUMDes "Kusuma Jaya" Desa Ngadikusuman, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan fokus utama pada Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes di Bidang Manajemen Keuangan. Tujuan spesifik kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes mengenai pentingnya tata kelola keuangan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
2. Memberikan pelatihan praktis mengenai pencatatan transaksi sederhana hingga penyusunan laporan keuangan sesuai kaidah akuntansi.
3. Mendampingi pengelola dalam menyusun laporan keuangan yang relevan sebagai alat pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja usaha.

Kegiatan PkM dilaksanakan melalui tiga tahapan utama:

1. Fase Sosialisasi dan Pre-test: Memberikan pemahaman dasar tentang peran dan fungsi BUMDes sebagai badan hukum serta pentingnya manajemen keuangan yang baik, diikuti dengan tes awal untuk mengukur pengetahuan dasar peserta.
2. Fase Pelatihan Inti (Ceramah dan Lokakarya): Materi pelatihan mencakup siklus akuntansi sederhana, pengenalan SAK ETAP yang relevan, teknik pencatatan transaksi harian, dan langkah-langkah praktis penyusunan Laporan Laba Rugi, Neraca, dan Laporan Arus Kas BUMDes. Peserta diajak langsung mempraktikkan pencatatan menggunakan data transaksi aktual dari unit usaha BUMDes Kusuma Jaya.
3. Fase Pendampingan dan Post-test: Melakukan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan setelah pelatihan untuk memastikan pengelola mampu mengimplementasikan sistem pencatatan yang baru dalam operasional sehari-hari. Fase ini diakhiri dengan evaluasi (post-test) untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta.

### **Hasil dan pembahasan**

Kegiatan PkM ini memberikan dampak yang signifikan bagi pengelola BUMDes "Kusuma Jaya". Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan pemahaman peserta yang signifikan terkait konsep dasar akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Lebih dari 85% peserta menunjukkan peningkatan skor pada post-test dibandingkan dengan pre-test. Secara konkret, luaran kegiatan ini adalah:

1. Terbentuknya sistem pencatatan dan pembukuan transaksi yang lebih terstruktur dan sistematis.
2. Tersusunnya contoh laporan keuangan dasar (Neraca dan Laba Rugi) BUMDes Kusuma Jaya yang sesuai dengan standar akuntansi, yang dapat digunakan sebagai contoh untuk periode selanjutnya.
3. Peningkatan kepercayaan diri pengelola dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa dan masyarakat.

Kegiatan PkM ini merupakan wujud nyata kontribusi Prodi Akuntansi FEB UNSIQ dalam mendorong tata kelola BUMDes yang profesional dan akuntabel, yang pada akhirnya akan memperkuat kemandirian ekonomi Desa Ngadikusuman. Diharapkan pendampingan ini dapat berlanjut untuk memastikan keberlanjutan penerapan tata kelola keuangan yang baik di BUMDes Kusuma Jaya.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Manajemen Keuangan BUMDES

### **Kesimpulan**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Dosen Program Studi Akuntansi FEB UNSIQ Wonosobo terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes "Kusuma Jaya" di bidang manajemen keuangan. Melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, pengelola mampu memahami konsep dasar akuntansi, melakukan pencatatan transaksi secara lebih sistematis, serta menyusun laporan keuangan sederhana sesuai kaidah yang berlaku. Peningkatan kompetensi ini berdampak pada meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan luaran nyata berupa sistem pembukuan yang lebih terstruktur dan contoh laporan keuangan yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan manajemen keuangan BUMDes menjadi faktor penting dalam mendukung pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, khususnya dalam program ketahanan pangan, serta dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder dan keberlanjutan usaha desa.

### **Saran**

#### **Bagi Pengelola BUMDes**

Perlu menjaga konsistensi dalam menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang telah diperoleh, serta terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan lanjutan, khususnya terkait penyusunan laporan keuangan yang lebih kompleks seperti arus kas dan konsolidasi unit usaha.

#### **Bagi Pemerintah Desa**

Diharapkan dapat memberikan dukungan berkelanjutan berupa fasilitasi pelatihan, pengawasan, serta penyediaan sarana pendukung agar pengelolaan keuangan BUMDes semakin profesional dan akuntabel.

## Bagi Perguruan Tinggi

Kegiatan pendampingan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur agar implementasi sistem keuangan dapat berjalan optimal, sekaligus memperluas cakupan program ke BUMDes lain

## Daftar Pustaka

- Ardiyansyah, C., & Pesudo, D. (2022). Gaya Kepemimpinan, Kearifan Lokal, Dan Akuntabilitas Bumdes. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(2), 38–55. <https://doi.org/10.24246/dekat.v1i2.9953>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (2025).
- Subandi. (2026, February 9). *Urgensi Alokasi 20 Persen Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan*. [https://Bumdes.Id/Bumdes\\_update/Artikel/Urgensi-Alokasi-20-Persen-Dana-Desa-Untuk-Ketahanan-Pangan?Utm](https://Bumdes.Id/Bumdes_update/Artikel/Urgensi-Alokasi-20-Persen-Dana-Desa-Untuk-Ketahanan-Pangan?Utm).
- Suryo Wibowo, M. I., & Sulistya Hapsari, A. N. (2022). Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 52–71. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.05>
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. 6, <https://peraturan.bpk.go.id/> (2014).